

NAMA : DELA NOVITA

NPM : 2313031023

1. Analisis Struktur Pengeluaran

Apakah struktur belanja sudah efisien

Alokasi anggaran pendidikan di Provinsi Nusantara Raya sebesar 22 persen dari APBD menunjukkan bahwa sektor pendidikan telah menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Namun jika dilihat dari hasil yang dicapai maka penggunaan anggaran tersebut belum berjalan secara efisien.

Hal ini terlihat dari capaian literasi dan numerasi siswa yang masih berada di bawah standar nasional serta masih lebarnya kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum sebanding dengan peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan.

Salah satu penyebab utama adalah dominasi belanja pegawai yang mencapai 68 persen dari total anggaran. Meskipun pengeluaran untuk guru penting, namun permasalahan muncul pada distribusi tenaga pendidik yang tidak merata, di mana kota mengalami kelebihan guru, sedangkan daerah terpencil masih kekurangan guru. Akibatnya, anggaran besar tidak memberikan dampak yang seimbang.

Selain itu, porsi anggaran untuk infrastruktur yang hanya 12 persen masih tergolong rendah, terutama di era digital saat ini yang membutuhkan fasilitas teknologi pendidikan yang lebih memadai.

Bagian yang perlu direalokasi

Beberapa pos anggaran perlu disesuaikan agar lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

- **Belanja pegawai sebesar 68 persen** perlu dikurangi menjadi sekitar 55 sampai 60 persen dengan perbaikan distribusi guru agar lebih merata antara kota dan desa.

- **Infrastruktur pendidikan sebesar 12 persen** perlu ditingkatkan menjadi sekitar 18 sampai 20 persen untuk mendukung pembangunan fasilitas digital seperti internet sekolah dan perangkat pembelajaran modern
- **Bantuan siswa sebesar 8 persen** perlu ditingkatkan menjadi 12 sampai 15 persen agar lebih banyak siswa dari keluarga kurang mampu mendapatkan dukungan pendidikan
- **Anggaran administrasi sebesar 12 persen** dapat dikurangi menjadi sekitar 8 sampai 10 persen melalui efisiensi dan digitalisasi layanan

2 Analisis Sumber Pembiayaan

Ketergantungan pada pemerintah daerah

Pembiayaan pendidikan di Nusantara Raya masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah daerah melalui APBD Hal ini membuat sistem pendidikan kurang fleksibel karena seluruh kebutuhan pembiayaan hanya bersumber dari satu pihak saja

Ketergantungan ini menjadi masalah karena kebutuhan pendidikan terus meningkat terutama untuk pemerataan guru pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kualitas pembelajaran Jika kondisi fiskal daerah melemah maka program pendidikan dapat terganggu dan tidak berjalan optimal

Selain itu berbagai masalah seperti rendahnya hasil belajar ketimpangan sekolah dan keterbatasan teknologi menunjukkan bahwa sumber pembiayaan yang ada saat ini belum cukup untuk menjawab tantangan pendidikan

Keterlibatan sektor swasta dan alternatif pembiayaan

Keterlibatan sektor swasta sangat diperlukan untuk memperkuat pembiayaan pendidikan Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks

Kerja sama dapat dilakukan melalui berbagai model seperti

- **Kemitraan pemerintah dan swasta** untuk pembangunan fasilitas sekolah dan infrastruktur digital
- **Program tanggung jawab sosial perusahaan** untuk membantu sekolah terutama di daerah tertinggal
- **Dana padanan pendidikan** dimana pemerintah menyesuaikan dana berdasarkan kontribusi swasta
- **Dana abadi pendidikan** sebagai investasi jangka panjang untuk mendukung beasiswa dan inovasi
- **Kerja sama dengan dunia industri** untuk mendukung pelatihan vokasi sesuai kebutuhan tenaga kerja

3 Perbandingan dengan Negara OECD

Praktik yang dapat diterapkan

Negara anggota OECD menerapkan sistem pendidikan yang lebih maju dengan pendekatan berbasis data dan kinerja Beberapa praktik yang relevan untuk diterapkan di Nusantara Raya antara lain

- Penganggaran berbasis hasil kinerja sekolah dimana dana diberikan sesuai capaian pendidikan seperti literasi dan numerasi
- Pendanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga sekolah di daerah tertinggal mendapat alokasi lebih besar
- Peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pelatihan dan evaluasi
- Sistem pemantauan pendidikan berbasis data digital untuk memastikan transparansi dan efektivitas kebijakan

Hambatan penerapan di Indonesia

Namun penerapan sistem tersebut menghadapi beberapa kendala seperti

- Data pendidikan yang belum sepenuhnya akurat dan terintegrasi
- Kesenjangan infrastruktur terutama akses internet di daerah terpencil
- Perbedaan kesiapan antar daerah dalam menerapkan sistem baru
- Rendahnya kesiapan sebagian tenaga pendidik terhadap sistem berbasis kinerja

4 Rancangan Reformasi Pembiayaan Pendidikan 5 Tahun

A Latar Belakang

Masalah utama pendidikan di Nusantara Raya bukan terletak pada jumlah anggaran yang kecil tetapi pada ketidaktepatan dalam pengalokasiannya Walaupun pemerintah telah mengalokasikan 22 persen APBD untuk pendidikan hasil yang dicapai masih belum optimal

Kualitas literasi dan numerasi siswa masih rendah dan kesenjangan antara sekolah kota dan desa masih cukup besar Sekolah di perkotaan memiliki fasilitas lebih lengkap serta jumlah guru yang memadai sedangkan sekolah di daerah terpencil masih kekurangan sarana dan tenaga pendidik

Selain itu perkembangan teknologi menuntut sistem pendidikan yang lebih modern namun banyak sekolah belum memiliki akses digital yang memadai.

B Tujuan Reformasi

Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan memperbaiki kualitas pembelajaran serta mengurangi kesenjangan pendidikan antar wilayah melalui pemerataan sumber daya dan digitalisasi pendidikan.

C Program Reformasi

1 Perubahan Struktur Anggaran

Struktur anggaran perlu disesuaikan agar lebih fokus pada peningkatan kualitas pendidikan

- Gaji dan tunjangan guru dari 68 persen menjadi sekitar 60 persen
- Infrastruktur dan digitalisasi dari 12 persen menjadi 20 persen
- Bantuan siswa dari 8 persen menjadi 12 persen

- Administrasi dari 12 persen menjadi 8 persen

Perubahan ini bertujuan agar anggaran lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan yang berdampak langsung pada kualitas pembelajaran

2 Peningkatan kualitas guru

a Pemerataan guru

Distribusi guru harus diperbaiki melalui pendataan ulang dan penempatan ulang ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik disertai dengan insentif bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah terpencil

b Pelatihan berkelanjutan

Guru perlu mendapatkan pelatihan rutin yang berfokus pada literasi numerasi metode pembelajaran aktif serta pemanfaatan teknologi pendidikan

c Evaluasi kinerja

Penilaian guru dilakukan tidak hanya berdasarkan administrasi tetapi juga berdasarkan kualitas pembelajaran dan perkembangan hasil belajar siswa

3 Digitalisasi sekolah

Digitalisasi dilakukan secara bertahap dimulai dari pemetaan sekolah yang belum memiliki akses internet kemudian pembangunan infrastruktur teknologi dilanjutkan dengan kerja sama sektor swasta

Pada tahap berikutnya teknologi digunakan secara aktif dalam proses pembelajaran sehingga tidak hanya menjadi fasilitas tetapi juga bagian dari metode belajar

4 Monitoring dan evaluasi

Sistem pengawasan dilakukan melalui platform data pendidikan terintegrasi yang mencakup data siswa guru sekolah dan anggaran Evaluasi dilakukan secara berkala setiap semester dan setiap tahun

Indikator yang digunakan meliputi peningkatan hasil belajar pemerataan guru akses teknologi serta pengurangan kesenjangan pendidikan antar wilayah

Hasil evaluasi harus disampaikan secara terbuka untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan

